

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung pula pada partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan ataupun pula dalam menerima kembali hasil pembangunan.

Pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan daerah karena keberhasilan dalam pembangunan daerah akan menunjang pula keberhasilan dalam pembangunan nasional. Adanya perubahan struktur yang menyangkut pembangunan wilayah suatu daerah, maka daerah memerlukan berbagai kebijaksanaan khususnya yang mengatur antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembangunan di wilayah masing-masing, sebab sukses dan tidaknya pembangunan semakin tergantung pada sukses dan tidaknya pembangunan di daerah. Keberadaan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten / kota yang mampu menyelenggarakan kelancaran dan pemerataan pembangunan mutlak diperlukan. Hubungan antara pusat dan daerah ini adalah berkaitan masalah otonomi daerah, khususnya pembagian tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya adalah kemampuan daerah di dalam mengadakan atau memperoleh dana-dana atau pendapatan asli daerah sendiri. Untuk merealisasikan kegiatan pembangunan yang tersebar di daerah-daerah, tidak terlepas dari unsur pembiayaan yaitu diperlukannya ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai dan pengelolaan yang baik, yang merupakan dasar utama bagi pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dilakukan, dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan program-program investasi dan penetapan sasaran-sasaran pembangunan.

Sejalan dengan struktur pemerintahan yang berlaku di tiap daerah di wilayah nasional terdapat tiga komponen pembiayaan pembangunan dari pemerintah, yaitu :

1. Pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan program-program pembangunan di daerah Propinsi.
2. Pembiayaan pembangunan dari pemerintah daerah Propinsi yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi untuk pembiayaan program pembangunan daerah Propinsi.
3. Pembiayaan pembangunan dari pemerintah daerah Kabupaten / Kota yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota untuk pembiayaan program-program pembangunan daerah Kabupaten / Kota.

Masing-masing komponen pembiayaan dari pemerintah tersebut diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan jalur-jalur yang telah ditentukan dan

tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat mempengaruhi berlangsungnya pembangunan.

Pembangunan ekonomi nasional selama pemerintah orde baru yang lebih terfokus pada pertumbuhan, ternyata tidak membuat banyak daerah di tanah air berkembang dengan baik. Proses pembangunan dan peningkatan kemakmuran sebagai hasil dari pembangunan selama itu lebih terkonsentrasi di pusat (Jawa), pada tingkat nasional laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun cukup tinggi dan tingkat pendapatan per kapita naik terus setiap tahun (sampai krisis terjadi), namun sebaliknya pada tingkat regional. Hal ini juga diikuti oleh kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang semakin besar.

Terjadinya ketimpangan ekonomi regional di Indonesia selama pemerintahan orde baru, berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, pemerintah pusat menguasai dan mengontrol hampir semua sumber-sumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam. Akibatnya daerah-daerah tersebut tidak dapat menikmati hasilnya dengan layak, juga bantuan dan pinjaman luar negeri, PMA, dan tata niaga di dalam negeri diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sehingga hasil yang diterima daerah lebih rendah daripada potensi ekonominya.

Konstelasi hubungan keuangan pusat dan daerah menyebabkan relatif kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan mendominasi konfigurasi APBD. Sumber-sumber

penerimaan yang relatif besar pada umumnya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sumber-sumber penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh pemerintah daerah (Tambunan, 2001 : 200)

Kondisi yang terjadi pada masa pemerintahan orde baru, semua kegiatan pemerintahan maupun kegiatan perekonomian di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang, dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan dan ketidakberdayaan ekonomi, muncul sentimen regional dan represi serta pelanggaran hak-hak masyarakat lokal. Dengan kondisi tersebut memicu masyarakat untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas.

Dalam menyikapi tuntutan dari masyarakat tersebut MPR RI menetapkan TAP MPR RI No. XV / MPR /1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dari aspek pengaturan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan daerah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagai pengganti UU No.32 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pokok undang-undang ini untuk mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjadikan daerah otonom yang mandiri dalam rangka menegakkan sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 mendorong daerah untuk berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri, karena selama ini daerah tidak dimungkinkan untuk mandiri, faktor yang menentukan mampu tidaknya suatu daerah untuk berotonomi yaitu kemampuan keuangan atau kapasitas dari potensi daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Ketergantungan kepada bantuan

pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian keuangan sendiri terbesar (Tambunan, 2001 : 202).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Sutrisno PH, 1981 : 187). Dapat dikatakan bahwa PAD merupakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Menurut UU No.25 / 1999 Pasal 4, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah. Semakin meningkatnya kewenangan yang ada pada daerah, peranan keuangan daerah sangat penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dananya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien. Untuk itu pemerintah daerah harus dapat menggali potensi daerah masing-masing guna peningkatan pendapatan asli daerah agar pembangunan daerah tetap berjalan.

Gambaran perekonomian di Yogyakarta dalam beberapa hal dapat dikatakan memiliki pola yang mirip dengan beberapa daerah lainnya, terutama pada saat terjadinya krisis ekonomi sejak tahun 1997. Pada tahun 1997 perekonomian DIY terpengaruh oleh merosotnya nilai rupiah terhadap US\$ dollar yang mulai terjadi

sesudah pertengahan tahun. Pada tahun 1998 kondisi perekonomian ternyata lebih buruk dibandingkan keadaan pada tahun 1997. Dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan angka negatif pada tahun 1998, yaitu sebesar $-23,57\%$. Sementara pada tahun 1997 laju pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan angka positif, yaitu $1,83\%$. Pada tahun 1999 perkembangan ekonomi nampaknya sudah mulai menunjukkan gejala ke arah pemulihan ekonomi. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan angka positif.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode 1993 – 1996 sebelum terjadi krisis ekonomi, terlihat cukup tinggi yaitu sebesar $7,90\%$ per tahun. Sedangkan pada periode 1996 – 2000, rata-rata pertumbuhan ekonomi masih memprihatinkan, yaitu sebesar $-0,87\%$. Sementara pada tahun 2000, pertumbuhan ekonomi secara sektoral menunjukkan bahwa semua sektor mengalami pertumbuhan positif, kecuali untuk sektor industri pengolahan dengan laju pertumbuhan sebesar $-2,69\%$ serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan laju pertumbuhan $-1,22\%$.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu (biasanya satu tahun) adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator makro untuk melihat perkembangan perekonomian suatu daerah. Perkembangan dan pertumbuhan sektor-

sektor ekonomi suatu daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur perekonomian daerah tersebut.

Selama tahun 1997 – 2000 rata – rata pangsa investasi (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto-PMTB) terhadap PDRB mencapai 24,72 % per tahun. Pada tahun 1997, kontribusi PMTB terhadap PDRB masih mencapai 26,93 %, namun menurun pada tahun 1998 menjadi 24,29 % dan menurun lagi menjadi 22,71 % pada tahun 1999. Selanjutnya pada tahun 2000 pangsa PMTB terhadap PDRB sedikit membaik menjadi 24,96 %. Secara umum selama tahun 1997 – 2000 kinerja investasi masih belum membaik, tergambar dari rata – rata pertumbuhan sebesar 4,19 %. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 1998, yakni sebesar -21,11 % meskipun sedikit membaik pada tahun 1999 dan 2000 dengan pertumbuhan masing – masing sebesar 4,72 % dan 6,46 %.

Berikut ini disajikan trend nilai PDRB Propinsi DIY dalam beberapa tahun terakhir :

Tabel 1.1
Perkembangan Nilai PDRB Tahun 1997 - 2002

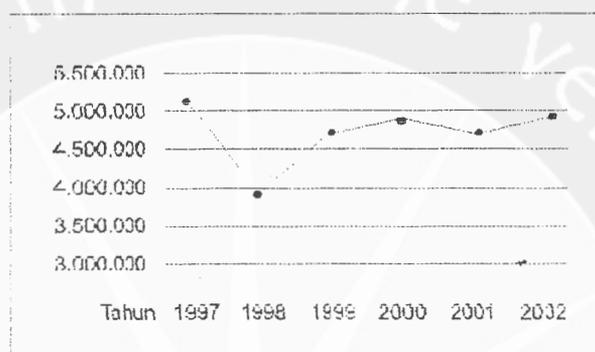
	PDRB (riil dalam juta Rp)	Pertumbuhan (%)
Tahun 1997	5.032.706	1,83
Tahun 1998	3.846.616	-23,57
Tahun 1999	4.620.199	20,11
Tahun 2000	4.724.977	2,27
Tahun 2001	4.673.421	-1,09
Tahun 2002	4.870.285	4,21

Sumber : BPS Propinsi DIY tahun 2002.

Tabel 1.1 memberikan gambaran adanya *trend* yang fluktuatif, dimana realisasi nilai PDRB dari tahun ke tahun cenderung berubah secara *fluktuatif* antara

positif dan negatif. Pertumbuhan tertinggi setelah krisis terjadi pada tahun 1999, yaitu nilai PDRB meningkat sebesar 20,11% dengan nilai Rp.4.620.199,-. Sedangkan pada tahun 1998 PDRB mengalami pertumbuhan negatif tertinggi sebesar -23,57% dengan nilai Rp.3.846.616,-

Gambar 1.1
Perkembangan Nilai PDRB Tahun 1997 – 2002



Sumber : BPS Propinsi DIY tahun 2000.

Yogyakarta memiliki potensi ekonomi yang cukup untuk dapat dimanfaatkan mendanai operasional pemerintahan dan pembangunan daerah. Sektor pariwisata dan kebudayaan menjadi contoh potensi yang dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Syarat penting dalam mengembangkan perekonomian di wilayah Yogyakarta adalah menciptakan modernisasi dalam segala bidang kegiatan perekonomian.

Perekonomian dalam pengembangannya membutuhkan dua faktor penting yaitu modal dan tenaga ahli. Faktor modal bagi daerah adalah dibutuhkannya masukan dana-dana investasi yang akan mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi di daerah. Pengadaan tenaga ahli dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan.

Investasi di sini adalah investasi yang merupakan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yaitu yang terdapat pada bagian PDRB dengan metode pendekatan menurut penggunaan / pengeluaran (*by expenditure*). Pengertian konsep pembentukan modal tetap bruto dalam suatu region adalah semua barang modal baru yang digunakan atau dipakai sebagai alat untuk proses produksi di suatu region. Barang-barang modal tersebut dapat diperoleh dengan cara membeli dari luar region, ataupun dari pengadaan di region itu sendiri. Jenis barang yang dikategorikan sebagai barang modal adalah barang-barang yang berumur satu tahun atau lebih, sedangkan yang dimaksud dengan pemakaian disini adalah penggunaan barang-barang modal tersebut sebagai alat yang tetap dalam proses produksi.

Pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan untuk dijadikan areal pertanian, daerah pemukiman, bendungan dan lain-lain serta untuk perluasan areal industri, semuanya merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto (investasi). Adapun *trend* nilai investasi di Propinsi DIY dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat di bawah ini

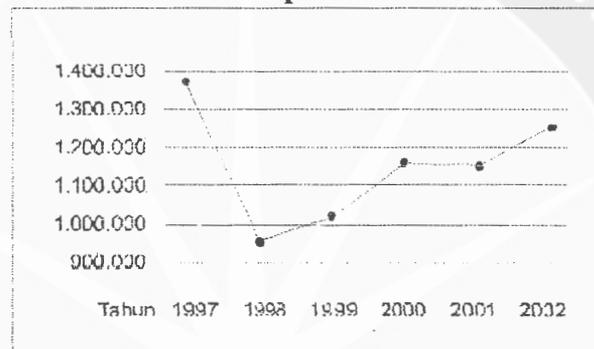
Tabel 1.2
Trend Nilai Investasi Propinsi DIY Tahun 1997 – 2002

	Investasi (riil dalam juta rupiah)	Pertumbuhan (%)
Tahun 1997	1.380.258	1,2
Tahun 1998	947.594	-31,3
Tahun 1999	1.049.401	10,7
Tahun 2000	1.167.693	11,3
Tahun 2001	1.151.564	-1,4
Tahun 2002	1.251.688	8,7

Sumber : BPS Propinsi DIY tahun 2002.

Tabel 1.2 memberikan gambaran adanya *trend* yang juga *fluktuatif*, dimana realisasi nilai investasi yang masuk di Propinsi DIY dari tahun ke tahun juga cenderung berubah secara *fluktuatif* antara tumbuh secara positif dan negatif. Pertumbuhan terbesar setelah krisis terjadi pada tahun 2000, yaitu nilai PDRB meningkat sebesar 11,3% dengan nilai Rp.1.167.693,-. Sedangkan pada tahun 1998 investasi mengalami pertumbuhan negatif terbesar yaitu -31,3% dengan nilai Rp.947.594,-

Gambar 1.2
Trend Nilai Investasi Propinsi DIY Tahun 1997 - 2002



Sumber : BPS Propinsi DIY tahun 2002.

Sementara itu dilihat dari aspek PAD, kinerja PAD Yogyakarta menunjukkan trend positif. Gambaran Perkembangan PAD selama kurun waktu beberapa tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.3
Trend Nilai Pendapatan Asli Daerah Propinsi DIY Tahun 1997 – 2002

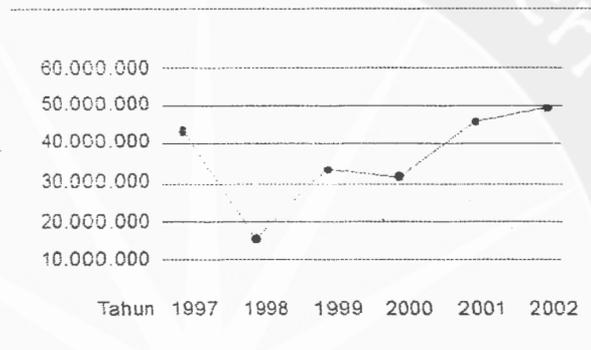
	PAD (riil dalam ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
Tahun 1997	42,577,568	3,0
Tahun 1998	16,057,875	-62,3
Tahun 1999	22,732,718	41,6
Tahun 2000	30,395,518	33,7
Tahun 2001	45,618,753	50,1
Tahun 2002	49,385,132	8,3

Sumber : BPS Propinsi DIY tahun 2002

Tabel 1.3 memberikan gambaran adanya *trend* yang positif, dimana realisasi nilai PAD yang masuk di Propinsi DIY dari tahun ke tahun cenderung positif. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2001, yaitu nilai PDRB meningkat sebesar 50,1% dengan nilai Rp.45,618,753,-. Namun adanya dampak krisis 1997 pada tahun 1998 PAD mengalami pertumbuhan negatif tertinggi sebesar -62,3% dengan nilai Rp.16,057,875,-

Gambar 1.3

Trend Nilai Pendapatan Asli Daerah Propinsi DIY Tahun 1997 – 2002



Sumber : BPS Propinsi DIY tahun 2002

Bertitik tolak dari berbagai hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY Periode Tahun 1975 – 2003”**

2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pengaruh variabel investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui pengaruh investasi terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.
- b. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.
- c. Mengetahui pengaruh pendapatan per kapita masyarakat terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.
- d. Mengetahui pengaruh investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita masyarakat secara bersama-sama terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.

4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yang ada di Propinsi DIY.

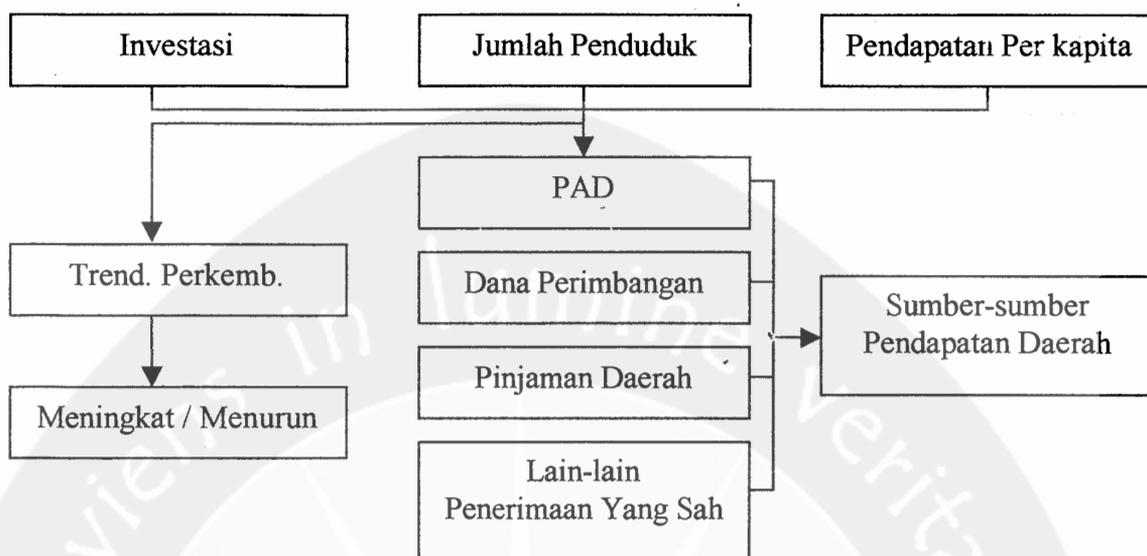
- b. Bagi Pemerintah Propinsi DIY

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagaimana pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan PAD.

- c. Bagi Pihak Lain

Merupakan tambahan informasi khususnya pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

5. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.4. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan UU No.25 Tahun 1999 sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, serta lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah sebagai salah satu pendapatan daerah diharapkan dapat ditingkatkan penerimaannya. Penelitian ini PAD dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti besarnya investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita.

Investasi sebagai salah satu komponen penting dari permintaan agregat yang merupakan satu faktor penting bagi pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi yang tinggi maka pembangunan ekonomi juga akan tinggi yang selanjutnya akan diikuti oleh meningkatnya penerimaan pemerintah daerah. Peningkatan permintaan dan penawaran barang dan jasa tidak terlepas dari meningkatnya jumlah penduduk dengan syarat penduduk tersebut yang mempunyai

kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi dari masyarakat pengguna jasa.

Semakin besar pendapatan per kapita berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi, yang diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat yang berujung pada peningkatan permintaan masyarakat. Termasuk di dalamnya konsumsi terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dan berpengaruh pula pada kemampuan dalam membayar pajak.

Pengaruh dari investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita masyarakat terhadap PAD kemudian diproyeksikan untuk mengetahui pengaruh di masa yang akan datang apakah meningkat atau menurun.

6. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah menyangkut besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita masyarakat baik secara bersama-sama maupun secara individual terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.

- a. Diduga besarnya investasi berpengaruh positif terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.
- b. Diduga besarnya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.
- c. Diduga besarnya pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh positif terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.

- d. Diduga besarnya investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIY.

7. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup, jenis data, sumber data, definisi operasional serta metode model analisis data.

7.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di wilayah Propinsi DIY dengan kurun waktu tahun 1975-2003.

7.2 Jenis Data

Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi yang berupa pembentukan modal tetap bruto, jumlah penduduk serta pendapatan per kapita tahun 1975-2003.

7.3 Sumber Data

Data yang digunakan berupa data sekunder, yang akan diperoleh melalui instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik Propinsi DIY, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Propinsi DIY serta dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian.

7.4 Definisi Operasional Variabel

a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Mekanisme pemungutan penerimaan daerah diatur berdasarkan peraturan daerah.

b. **Investasi**

Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan pembeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi yang menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian yang dinyatakan dalam rupiah.

c. **Jumlah penduduk**

Jumlah penduduk merupakan keseluruhan penduduk Propinsi DIY yang tercatat pada akhir tahun yang dinyatakan dalam jiwa.

d. **Pendapatan Per kapita**

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan masyarakat Propinsi DIY yang diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk.

7.5. Model Analisa Data

Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan variabel dependen PAD dan variabel independen investasi, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita seperti yang dikutip oleh Simporosa (2000). Bentuk model teoritis yang digunakan adalah :

$$PAD = f(\text{Inv}, \text{Pdk}, \text{Pkpt})$$

$$F_{\text{inv}} > 0, f_{\text{pdk}} > 0, f_{\text{pkpt}} > 0 \dots \dots \dots (1.1)$$

Dimana :

PAD = Pendapatan Asli Daerah (ribuan rupiah)

Inv = Investasi (juta rupiah)

Pdk = Jumlah Penduduk (jiwa)

Pkpt = Pendapatan per kapita (juta rupiah).

Apabila data berbentuk linier, maka persamaan untuk model yang ditaksir adalah :

$$PAD = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Inv} + \alpha_2 \text{Pdk} + \alpha_3 \text{Pkpt} + e \dots \dots \dots (1.2)$$

Apabila data berbentuk log linear, maka persamaan untuk model ditaksir adalah :

$$\ln PAD = \ln b_0 + b_1 \ln \text{Inv} + b_2 \ln \text{Pdk} + b_3 \ln \text{Pkpt} + u$$

Keterangan :

α_0 = konstanta

$\alpha_1, b_1, \alpha_2, b_2, \alpha_3, b_3$ = koefisien regresi masing-masing variabel

e, u = variabel pengganggu atau *error*.

Untuk mengetahui apakah persamaan yang digunakan berbentuk linear atau non linear, maka dilakukan uji *MacKinnon, White and Davidson* (MWD). Dalam penelitian ini hipotesis tentang linearitas persamaan regresi ditetapkan, sebagai berikut :

H_0 = variabel Y merupakan fungsi linier dari variabel X

H_a = variabel $\ln Y$ merupakan fungsi linier dari variabel $\ln X$.

Adapun langkah Pengujian MWD :

1. Mengestimasi model linier dan mendapatkan nilai Y yang diestimasi dan disebut sebagai $Y_f(\hat{Y})$

$$\widehat{PAD} = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 \ln Inv + \hat{\alpha}_2 Pdk + \hat{\alpha}_3 Pkpt + u \dots \dots \dots (1.3)$$

2. Mengestimasi model log linier dan mendapatkan nilai ln Y yang diestimasi dan disebut sebagai $\ln f = \widehat{\ln Y}$

$$\widehat{\ln PAD} = \hat{\beta}_0 + \hat{b}_1 \ln Inv + \hat{b}_2 \ln Pdk + \hat{b}_3 \ln Pkpt + v \dots \dots \dots (1.4)$$

$$\beta_0 = \ln b_0$$

3. Cari nilai $Z_1 = (\ln Y_f - \ln f)$

$$= \widehat{\ln PAD} - \widehat{\ln PAD}$$

4. Meregresikan Y dengan Xi dan Z_1

$$\widehat{PAD} = \hat{c}_0 + \hat{c}_1 \ln Inv + \hat{c}_2 Pdk + \hat{c}_3 Pkpt + \hat{c}_4 Z_1 + e \dots \dots \dots (1.5)$$

H_0 ditolak jika nilai koefisien Z_1 secara statistik signifikan berdasarkan uji t.

5. Mendapatkan $Z_2 = (\text{antilog } \ln f - Y_f)$.

$$= \text{antilog } \widehat{\ln PAD} - \widehat{PAD}$$

6. Meregresikan log Y dengan log X dan Z_2 .

$$\ln PAD = \hat{D}_0 + \hat{d}_1 \ln Inv + \hat{d}_2 \ln Pdk + \hat{d}_3 \ln Pkpt + \hat{d}_4 Z_2 + \varepsilon \dots \dots \dots (1.6)$$

$$D_0 = \ln d_0$$

H_1 ditolak jika nilai koefisien Z_2 adalah signifikan secara statistik dengan menggunakan uji t. Jika model linier memiliki model yang tepat, variabel Z_1 seharusnya secara statistik tidak signifikan. Dalam kasus ini nilai Y yang

diestimasi dari model linier dan nilai Y yang diestimasi dari model log linier seharusnya tidak berbeda.

7.6. Uji yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode OLS dengan menggunakan beberapa uji. Pengujian dilakukan agar regresi yang diterapkan menghasilkan estimasi yang valid dan sah, yaitu meliputi uji asumsi klasik dan uji statistik.

7.6.1. Uji Asumsi Klasik

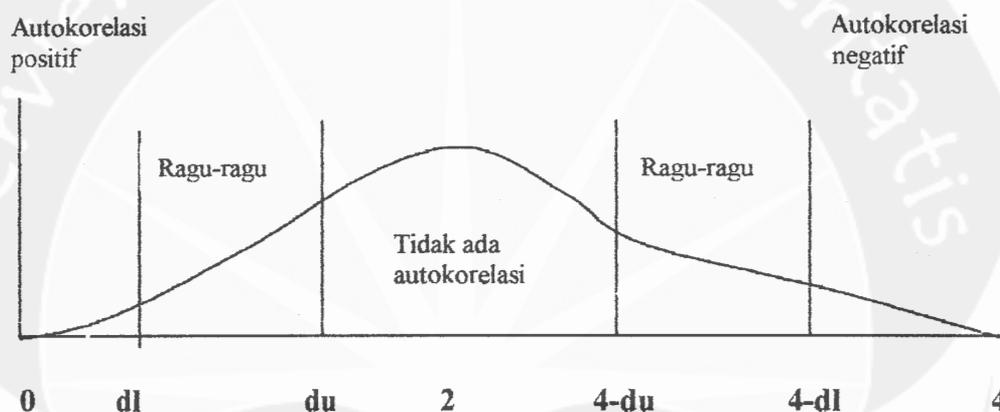
Model regresi yang digunakan akan benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representative atau disebut BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), maka model regresi tersebut harus memenuhi asumsi dasar klasik regresi, asumsi dasar tersebut adalah apabila tidak terjadi gejala autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinearitas diantara variabel bebas dalam regresi tersebut. Adapun penjabaran dari uji asumsi dasar klasik regresi di atas adalah sebagai berikut :

a. Autokorelasi

Autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana data-data dalam satu variabel terjadi saling hubungan. Dalam pengujian dengan menggunakan *Program Eviews*, maka standar bahwa dalam suatu kelompok data dikatakan bebas atau tidak dari autokorelasi, sebagai berikut (Ghozali, 2001: 62):

- i. Bila nilai Durbin Watson terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.

- ii. Bila nilai Durbin Watson lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (d_l), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- iii. Bila nilai Durbin Watson lebih besar daripada ($4-d_l$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
- iv. Bila nilai Durbin Watson terletak diantara batas atas (d_u) dan batas bawah (d_l), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.



Gambar 1.5. Statistik d Durbin – Watson

b. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama atau varian yang tidak konstan. Gejala heteroskedastisitas ini dapat dideteksi dengan menggunakan uji Park, dengan urutan langkah sebagai berikut (Sugianto, 1994:81):

1. Menaksir atau mengestimasi model dasar untuk mendapatkan nilai residual.
2. Membuat regresi berikutnya dengan residual sebagai variabel dependen.

Regresi ini dilakukan secara individu terhadap masing-masing variabel independen. Menaksir persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\ln e_i^2 &= \ln \beta_0 + \beta_1 \ln \text{Inv} + \beta_2 \ln \text{Pdk} + \beta_3 \ln \text{Pkpt} + v_i \\ &= \alpha + \beta_1 \ln \text{Inv} + \beta_2 \ln \text{Pdk} + \beta_3 \ln \text{Pkpt} + v_i\end{aligned}$$

3. Melakukan pengujian dengan uji t untuk mengetahui apakah koefisien β tersebut secara statistik signifikan atau tidak yaitu dengan hipotesis, sebagai berikut :

$$H_0 : \beta = 0$$

$$H_a : \beta \neq 0$$

Apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_0 ditolak, yang berarti secara statistik koefisien β signifikan. Dengan demikian dalam model regresi mengandung gejala heteroskedastisitas. Apabila t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka H_0 diterima, yang berarti secara statistik koefisien β tidak signifikan. Dengan demikian dalam model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

a. Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan di antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Hubungan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk persamaan :

$$\text{Inv} = f(\text{Pdk}, \text{Pkpt})$$

$$\text{Inv} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Inv} + \alpha_2 \text{Pdk} + e$$

$$\text{Pkpt} = f(\text{Pdk})$$

$$= \delta_0 + \delta_1 \text{Inv} + \mu$$

Untuk melihat hubungan di antara variabel independen dalam model dapat dilakukan tes yang menghasilkan kesimpulan ada atau tidak ada hubungan yang signifikan di antara variabel independen tersebut dengan metode *auxiliary regression*. Kemudian nilai F dari *auxiliary regression* tersebut dibandingkan dengan F_{tabel} .

Adapun rumus untuk mencari F_{hitung} adalah (Gujarati, 2003:361) :

$$F_i = \left[\frac{R^2_{\text{inv. pdk. pkpt. x}_k} / (k - 2)}{(1 - R^2_{\text{inv. pdk. pkpt. x}_k}) / (n - k + 1)} \right]$$

Keterangan :

F_i : F_{hitung}

k : jumlah variabel bebas termasuk konstanta

n : jumlah data.

Apabila nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka hal ini berarti bahwa variabel bebas tertentu mempunyai korelasi dengan variabel bebas yang lain dan disimpulkan terjadi multikolinearitas. Namun jika nilai F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} , maka hal ini berarti bahwa variabel bebas tertentu tidak mempunyai korelasi dengan variabel bebas yang lain dan disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

7.6.2. Uji Statistik

Pengujian semua hipotesis dilakukan dengan uji pada masing-masing koefisien dengan uji t, uji variabel secara bersama-sama untuk menguji seluruh variabel bebas dengan uji F dan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel

penjelas mampu menjelaskan variasi variabel yang dijelaskan dengan koefisien determinasi (R^2).

a. Uji F (Uji keseluruhan Koefisien Regresi).

Merupakan pengujian variabel-variabel independen secara keseluruhan dan serentak yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah :

$$1) H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

$$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq 0$$

F_{hitung} dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Gujarati 1988: 222):

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R)^2 / (n - k)}$$

Keterangan :

R^2 = koefisien determinasi

n = jumlah data

k = jumlah variabel bebas termasuk konstanta.

Kriteria pengujian adalah :

- a) Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 tidak ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh secara serentak dari semua variabel independen terhadap variabel dependen pada derajat keyakinan tertentu.

- b) Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa semua variabel independen secara serentak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pada derajat keyakinan tertentu.

b. Uji t

Merupakan pengujian variabel penjelas secara individu yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian hipotesis :

1. $H_0 : \alpha_i = 0$

$H_a : \alpha_i \neq 0$

$t_{tabel} \rightarrow t_{\alpha/2 ; n - k}$

Keterangan :

α_i = koefisien regresi

n = jumlah sampel

k = banyaknya parameter termasuk konstanta.

2. Menentukan t hitung dengan rumus (Gujarati, 1988: 109):

$$t_{hit} = \frac{\hat{\alpha}_i}{se[\hat{\alpha}_i]}$$

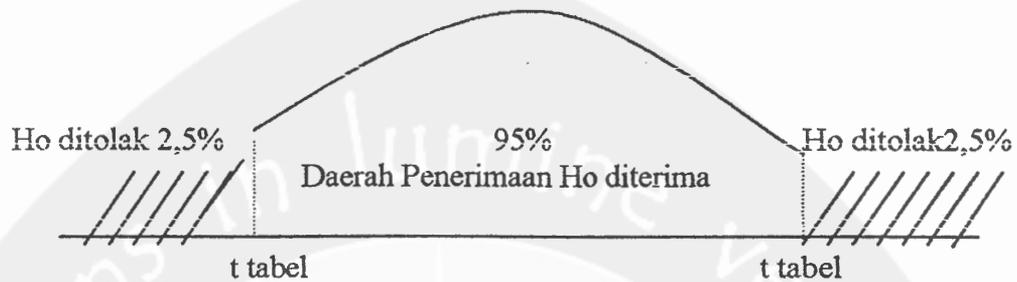
Keterangan :

$\hat{\alpha}_i$: Koefisien regresi

se : *Standard error* koefisien regresi

i : 1,2,3, ...

3) Kriteria pengujian :



Pengujian dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada tingkat kepercayaan tertentu. Dari hasil tersebut dapat ditentukan metode pengambilan keputusannya. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini dapat dikatakan variabel independen secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat dikatakan variabel independen secara statistik berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel dengan mencocokkan penyebaran datanya. R^2 menyatakan seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen. Adapun R^2 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Gujarati, 1998: 182):

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS} = 1 - \frac{\sum (Y_i - \hat{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2} = 1 - \frac{\sum \hat{e}_i^2}{\sum y_i^2}$$

Keterangan :

ESS : *explained sum of squares*

RSS : *residual sum of squares*

TSS : *total sum of squares.*



8. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori ini memuat uraian teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain teori tentang PAD maupun referensi tentang pembangunan ekonomi secara umum.

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam gambaran umum ini memuat tentang deskripsi perekonomian Propinsi DIY, perkembangan PAD, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, investasi serta indikator ekonomi lain yang relevan.

BAB IV ANALISIS DATA

Dalam analisis data ini dijabarkan hasil pengujian, meliputi asumsi klasik, yang terdiri dari *autokorelasi*, *multikolinearitas* dan *heteroskedastisitas*, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan *t test* dan *F test*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran berisikan kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan beserta penyajian beberapa saran dari peneliti berkaitan dengan hasil yang diperoleh.